**PENATAAN KAWASAN SUNGAI WINONGO BERBASIS MASYARAKAT OLEH FORUM KOMUNIKASI WINONGO ASRI (FKWA) DI PAKUNCEN YOGYAKARTA**

**WAHIDATUL RIZQI FIRIANTI**

**Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Email : wahidatulrizqi16@gmail.com**

**Abstrak**

Semua kota besar mempunyai permukiman kumuh yang berada di sungai. Selama ini penataan kawasan kumuh langsung dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya sering ditolak/tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Oleh karena itu muncul konsep penataan kawasan berbasis masyarakat. Salah satunya terjadi RW 10 Pakuncen pinggir Sungai Winongo. proses penataan kawasan sungai berbasis masyarakat di Pakuncen Yogyakarta ini melalui enam tahap, yakni tahap *assassment*/identifikasi masalah, tahap perencanaan, tahap lobbying, tahap pelaksanaan, tahap monitoring evaluasi. Artikel ini bertujuan untuk melihat proses penataan kawasan Pakuncen berbasis masyarakat dan dampaknya. Tulisan ini mendiskusikan terkait proses dan dampak dari penataan kawasan Sungai Winongo yang ada di Pakuncen Yogyakarta.

Dalam menggali data-data lapangan, penulis menggunakan metode kualitatif. Setelah data lapangan lengkap selanjutnya dianalisis dengan menarik sebuah kesimpulan. Untuk menguji hasil data lapangan, penulis mencoba melakukan validitas dengan metode trianggulasi.

Penulis dapat menemukan bahwa progam penataan kawasan sungai berbasis mayarakat dominan berdampak positif. Dampak penataan tersebut adalah adanya perubahan kondisi fisik/lingkungan yang lebih baik, adanya perubahan perilaku masyarakat, tumbuhnya kesadaran masyarakat yang dapat meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong yang lebih baik dari sebelumnya, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari penataan tersebut adanya remaja yang menjadikan kawasan pinggiran sungai untuk kumpul-kumpul dan meresahkan masyarakat.

**Kata kunci** : *Penataan Kawasan Sungai, Berbasis Masyarakat, Proses dan Dampak*

***Abstract***

*All major cities have slums located on the river. During this time the arrangement of slums was directly carried out by the government, but the results were often rejected / not in accordance with the conditions of the community. Therefore, the concept of community-based regional arrangement emerged. One of them happened RW 10 Pakuncen on the edge of Winongo River. The community-based river basin structuring process in Pakuncen Yogyakarta goes through six stages, namely the assessment / problem identification stage, the planning stage, the lobbying stage, the implementation stage, the evaluation monitoring stage. This article aims to look at the process of structuring the community-based Pakuncen area and its impacts. This paper discusses the process and impact of the structuring of the Winongo River in Pakuncen, Yogyakarta. In exploring field data, the writer uses qualitative methods. After the complete field data is then analyzed by drawing a conclusion. To test the results of field data, the author tries to do validity with the triangulation method. The author can find that the dominant community-based river basin arrangement program has a positive impact. The impact of the structuring is a change in physical / environmental conditions that are better, a change in community behavior, growing community awareness that can increase aspirations and community participation and foster a better mutual cooperation spirit than before, and improve the community's economy. While the negative impact of the arrangement is the presence of teenagers who make the riverside area to get together and unsettle the community.*

*Keywords: arrangement of river areas, Community Based, Process and Impact*

**Pendahuluan**

Indonesia mempunyai sungai-sungai besar yang hampir semuanya mempunyai permasalahan dengan penataan permukiman kumuh (slum area). Di Jakarta, Surabaya, Solo, Yogyakarta dan kota besar lainnya masih banyak masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Permukiman yang berada di kawasan sungai merupakan permukiman padat yang menempati lahan di tepi sungai sering dianggap sebagai penyebab terjadinya pengotoran lingkungan sungai dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain, penghuni telah bertahun-tahun menempati lokasi tersebut sehingga pemerintah sulit untuk memindah atau menggusurnya.

Kawasan pusat kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan dan harga tanah yang semakin tinggi, sehingga banyak orang terpinggirkan dan terpaksa memanfaatkan tepian sungai untuk pemukiman[[1]](#footnote-1). Permukiman pinggiran sungai menjadi kumuh dan memunculkan berbagai masalah sosial. Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu dilakukan penanganan kawasan sehingga tercapai suatu lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni. Pentingnya penanganan permasalahan permukiman kumuh ini, sejalan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang tersebut mengatur pemerintah diminta untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur[[2]](#footnote-2). Pemerintah selama ini telah melakukan berbagai macam progam penataan yang terkadang identik dengan penggusuran. Akibatnya, terjadi perlawanan dari masyarakat terhadap progam-progam pemerintah tersebut. Meskipun demikian ada cara baru dalam proses penataan kawasan sungai, yaitu dengan penataan yang berbasis masyarakat.

Penataan berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Hal ini misalnya yang terjadi dalam pembangunan Kampung Warna-Warni yang ada di daerah Jodipan, Malang. Masyarakat mampu menata ulang kampung yang dulunya kumuh menjadi lebih indah dan tanpa penggusuran.

Salah satu kawasan di Yogyakarta yang melakukan penataan ulang kawasannya adalah Kampung Pakuncen, Yogyakarta, lebih tepatnya di RW 10. Lokasi ini pada awalnya merupakan wilayah yang kumuh, tak tertata, sarang masalah sosial, dan tidak aksesable ke layanan umum. Selain itu lokasi ini dahulu juga menjadi langgangan banjir dan kawasan yang tidak layak huni sehingga rentan terhadap risiko bencana. Jika terjadi banjir dan kebakaran dengan jalan yang kurang lebih 1m akses untuk masuk ke lokasi ini cukup kecil.

Saat ini Pakuncen telah berubah, kampung yang dulunya tidak punya akses jalan saat ini telah punya fasilitas jalan yang memadai, lingkungan juga sudah tertata rapi. Bahkan penataan kawasan ini dianggap telah berhasil sehingga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memilih model penataan kawasan ini sebagai salah satu model penataan lingkungan sungai yang nantinya bisa diterapkan di Jakarta[[3]](#footnote-3). Proses penataan kawasan ini tidak lepas dari lembaga yang melakukan pendampingan yaitu Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). FKWA menjembatani aspirasi masyarakat dengan keinginan pemerintah.

Dalam studi literatur Indikator dikatakan kumuh adalah : pertama, kondisi bangunan dengan kriteria keteraturan bangunan, kepadatan bangunan, persyaratan teknis. Kedua kondisi jalan lingkungan dengan kriteria cakupan pelayanan, kondisi/kualitas infrastruktur. ketiga, kondisi drainase lingkungan dengan kriteria cakupan pelayanan, kondisi/kualitas infrastruktur. Keempat, kondisi penyediaan air minum dengan kriteria cakupan pelayanan, kondisi/kualitas infrastruktur. Kelima, kondisi pengelolaan limbah dengan kriteria cakupan pelayanan, kondisi/kualitas infrastruktur. Keenam, Kondisi pengelolaan sampah dengan kriteria cakupan pelayanan, kondisi/kualitas infrastruktur. Ketujuh, kondisi pengamanan kebakaran dengan kriteria cakupan pelayanan, kondisi/kualitas infrastruktur [[4]](#footnote-4). Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penyebab kumuh diantaranya dikarenakan urbanisasi yang tinggi.

Berdasarkan teorinya Isbandi Rukminto Adi proses penataan sungai yaitu meliputi tahap-tahap yakni Tahap Assessment, Tahap Perencanaan alternatif program, Tahap Pelaksanaan (Implementasi), Tahap Monitoring atau Pemantauan, Tahap Evaluasi[[5]](#footnote-5). Sedangkan Proses Penataan Kawasan Sungai Berbasis Masyarakat merupakan Pendekatan penataan kawasan sungai memakai pendekatan bottom up dan partisipatif yang berarti masyarakat lebih berperan aktif dalam pemberian gagasan dan ide awal sampai akhir yang dirumuskan oleh banyak pihak berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat yang dimaksud adalah penataan yang mengandalkan partisipasi masyarakat. Partisipasi disini diartikan sebagai suatu proses keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah. Pemaknaan seperti ini memberikan keterlibatan yang luas dalam tiap proses pembangunan. Hal ini seperti pemikiran Britha Mikkelsen yang menjelaskan pemberdayaan masyarakat berbasis masyarakat melalui Tahap Keterlibatan pada Identifikasi Masalah, Tahap Keterlibatan dalam Proses Perencanaan, Tahap Keterlibatan Pelaksanaan, Tahap Keterlibatan Evaluasi, Tahap Keterlibatan Monitoring dan Mitigasi[[6]](#footnote-6) .

Dalam menangani pembangunan Indonesia ini manusia tentu tidak dapat mengabaikan aspek lingkungan terutama lingkungan non fisiknya. Dari serangkaian proses maka akan ada hasil atau akibat yang didapat dari pelaksanaan penataan kawasan sungai terdapat beberapa pengertian lingkungan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang terdapat dalam penataan kawasan sungai, Lingkungan sosial, Lingkungan ekonomi, dan Lingkungan perilaku[[7]](#footnote-7).

Berdasarkan hasil analisis pada kajian penelitian penataan kawasan sungai berbasis masyarakat. Dalam penelitian Sekar Ika Indrawati yang berjudul ”Keragaman Pemanfaatan Sungai Oleh Masyarakat Pada Bantaran Sungai Winongo Di Kecamatan Ngampilan Dan Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2010[[8]](#footnote-8), pemanfaatan Sungai Winongo yakni masyarakat ada yang budidaya karamba dan ada masyarakat yang ingin melestarikan tanaman vegetasi disepanjang tebing sungai. Apabila ada kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian sungai kurang dan terus dijadikan budaya, maka dapat menimbulkan keseimbangan ekosistem yang ada dan dapat berdampak negatif terhadap upaya pembangunan yang ada. Dalam penelitiannya langkah-langkah yang digunakan peneliti adalah melihat kondisi sekitar, mengikuti proses perencanaan, dan memantau jalannya pelaksanaan pemanfaatan budidaya keramba. dampak keragaman pemanfaatan Sungai Winongo dan penataan kawasan Sungai Winongo yakni dampak ekonomi.

Disisi lain Karim membahas tentang perilaku masyarakat dalam memperlakukan sungai sangat buruk. Sungai dijadikan tempat buang sampah limbah rumah tangga. Program penataan bantaran sungai Bau-Bau yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bau-Bau memberikan perubahan kualitas lingkungan pada masyarakat yang tinggal disekitarnya menjadi lebih baik. Cara penataanya dilihat dari karakteristik masyarakat, kegiatan penataan bantaran Sungai Bau-Bau, identifikasi terhadap pola hunian sesudah penataan, aktivitas masyarakat dilihat sebelum dan sesudah penataan[[9]](#footnote-9). Catatan penting dari Widodo tentang pemberdayaan dan partisipasi masyarakat terkait pengelolaan kawasan sungai code. Bentuk dari pemberdayaan dan partisipasi masyarakatnya adalah pengembangan komunitas lokal Sungai Code dengan evaluasi partisipasi komunitas, dan arahan pengembangan komunitas dalam pengelolaan sungai.[[10]](#footnote-10)

Dalam penelitian ini akan mengkaji tentang Penataan Kawasan Sungai berbasis Masyarakat oleh Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) yang menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam lingkungan sosial dengan melihat proses dan dampaknya. Apakah proses penataan kawasan RW 10 Pakuncen (Sungai Winongo) berbasis masyarakat yang dahulu kawasan kumuh dan tidak aksesibel menjadi kawasan yang asri berdampak setelah adanya proses penataan kawasan berbasis masyarakat tersebut ? Tentu saja, pendekatan yang dilakukan melalui program pemberdayaan dengan bertumpuan pada masyarakat Maka dari itu, artikel ini bukan sebuah kajian perumusan kebijakan yang dijadikan blue print bagi pemerintah dalam pentaan kawasan sungai berbasis masyarakat. Namun lebih kepada pengembangan diskursus keilmuan sehingga menjadi wacana baru yang lebih dealektis dan diharapkan mendapat kritik tajam dari siapapun yang akan melakukan kajian lanjut mengenai penataan kawasan sungai.

Kajian ini merupakan hasil pengembangan dari tugas akhir untuk menyelesaikan studi strata-1. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan pada kajian ini adalah metode kualitatif. Prosespengambilan data dilakukan dengan observasi dan interview secara langsung kepada para informan yang sehari-hari beraktivitas di sekitar kawasan Sungai Winongo. Mulai dari tokoh masyarakat RW 10 Pakuncen, lembaga/pengurus FKWA, masyarakat yang terdampak akibat penataan kawasan sungai dan stakeholder yang terlibat dalam proses penataan kawasan sungai baik dari SKPD, Akademisi maupun masyarakat lainnnya.

**Proses penataan kawasan Sungai Winongo**

Awal mula penataan kawasan di Pakuncen adalah adanya sosialiasi dari FKWA yang diadakan di Pendopo Sawo tahun 2012. Sosialisasi ini dijadikan FKWA sebagai kampanye sungai dan ajakan ke masyarakat untuk peduli terhadap sungai. Dalam pertemuan tersebut yang hadir perwakilan FKWA adalah Bapak Purnomo yang saat itu adalah salah satu anggota FKWA Kota. Dari usulan Bu Ana tadi Pak Purnomo mencatat dan menyampaikan ke Bu Endang Selaku Ketua FKWA DIY untuk menemukan bagaimana solusi untuk Pakuncen. Pada saat itu yang dilakukan FKWA adalah mencari informasi terkait permasalahan apa yang ada di Pakuncen. Permasalahan di Pakuncen bermula adanya kandang sapi di bantaran sungai. Adanya kandang sapi menyebabkan setiap hari jalan yang digunakan masyarakat beraktifitas menjadi terganggu apabila ada penurunan sapi sampai harus menunggu beberapa jam untuk bisa melewati jalan tersebut karena akses masyarakat hanya satu jalan saja. Kondisi ini menyebabkan apabila ada suatu acara seperti hajatan dan lelayu maka masyarakat tidak dapat mempunyai akses untuk lewat dan harus mencari jalan lain. Berdasarkan keluhan tersebut kemudian FKWA turun untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Prosesnya melalui enam tahap, yaitu: Tahap Assessment, Tahap Lobbying, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Monitoring, dan Tahap Evaluasi.

* Tahap Assessment

Langkah awal yang dilaksanakan oleh FKWA dalam penataan kawasan Sungai Winongo ini adalah Assessment atau bisa disebut penilaian dini. Tahap ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga sumber daya yang dimiliki oleh kelompok sasaran[[11]](#footnote-11). penataan kawasan Sungai Winongo di perlukan data assessment guna untuk mengobservasi permasalahan yang ada di bantaran Sungai Winongo, baik masalah sosial maupun masalah pembangunan fisik di sepanjang bantaran sungai. Ketika data ini ada masalah diharapkan jika ada penataan kawasan sungai harapannya tidak ada tumpang tindih antara wilayah satu dengan yang lainnya. Namun, dalam hal ini terkadang masih banyak kendala di lapangan yang terjadi dalam proses pengambilan data. Hal ini dikarenakan terkadang masyarakat mengira bahwa ketika ada survey atau pihak luar mewawancarai masyarakat harapannya adalah diberi bantuan pembangunan, dan adapula yang mengaggap bahwa akan ada isu penggusuran. Selanjutnya ada yang menganggap bahwa survey penataan kawasan sungai Winongo ini dikarenakan adanya proses penggusuran dari pemerintah sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa survey ini tidak diperlukan. Dari hal di atas berarti proses assessment ini akan menjadi kendala apabila pemikiran masyarakat masih seperti di atas, dan menjadikan proses assessment tidak bisa obyektif ketika data dan informasi tidak sesuai dengan keadaan saat itu juga. Proses Assessment ini diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dengan adanya permasalahan di atas maka dari SKPD yang terkait dalam proses penataan kawasan Sungai Winongo mempunyai acuan sendiri terkait proses assessment ini. pihak SKPD dalam upaya penataan kawasan sungai ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal ini seperti yang dikatakan Bapak Prasetyo bahwa ada SOP dalam penataan kawasan sungai. Sedangkan proses assessment yang dilakukan dengan warga yakni bermula dari mimpi masyarakat yang menginginkan wilayah mereka tidak kumuh dan tidak dibedakan dengan wilayah lainnya. Maksudnya adalah cara menyadarkan masyarakat bahwasanya penataan kawasan sungai di Pakuncen bermula dari mimpi masyarakat. bahwa proses assessment ini adalah proses pengidentifikasian masalah dan mencari kebutuhan masyarakat yang ada di bantaran Sungai Winongo, namun dalam realitanya masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa proses assessment ini dianggap sebagai proses untuk memberikan bantuan bahkan untuk penggusuran lahan. Asumsi ini mulai terbantahkan ketika Ibu Endang menjelaskan akan selalu berpihak ke masyarakat tanpa peran. Assessment ini dilakukan oleh FKWA untuk digunakan sebagai data awal.

* Penyusunan Perencanaan

Proses selanjutnya setelah assessment adalah proses perencanaan progam. Proses ini merupakah tahapan penting dalam serangkaian kegiatan penataan kawasan Sungai Winongo. Proses ini merupakan proses perencanaan progam kegiatan penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh Forum Komunikasi Winongo Asri di Pakuncen Yogyakarta ini sehingga, dalam melakukan pemberdayaan penataan kawasan sungai akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Proses perencanaan progam yang dilakukan oleh FKWA bersama masyarakat ini bertujuan untuk memecahkan masalah sosial yang ada di RW 10 Pakuncen, sehingga proses perencanaan melalui FGD (Forum Group Discussion) sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Kegiatan perencanaan ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya permasalahan tersebut. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif progam dan kegiatan yang dapat mereka lakukan[[12]](#footnote-12).

FGD awal yang dilaksanakan di Pakuncen ini dilakukan pada tahun 2012, di Pendopo Sawo. Dalam pertemuan saat itu yang hadir adalah pengurus RW 10 dan 11, tokoh masyarakat, ketua RT setempat, dan yang memfasilitasi adalah FKWA. Hasil pertemuan itu adalah usulan RW 10 tentang penataan kawasan, solusi masalah persampahan, dan kampanye sungai. Dari FGD ini FKWA menjadi penghubung dalam menjembatani usulan masyarakat. FKWA mengupayakan ke dinas yang terkait penataan kawasan sungai. Usulan saat itu tidak langsung di eksekusi oleh dinas yang terkait. Kemudian FGD yang selanjutnya adalah mengajak warga Pakuncen untuk memulai bermimpi dan mengadakan sosial eko Mapping yang dilaksanakan pada tahun 2012 dengan harapan masyarakat bisa mengenali potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Pakuncen. Hasil FGD tersebut adalah grand desain sementara yakni gambaran sederhana. Grand desain ini mulai dilakukan tahun 2012 adanya slot untuk Pakuncen dalam hal ini RW 10 yaitu pembangunan talud permukiman.

Dalam hal ini perencanaan progam penataan kawasan Sungai Winongo yang dipakai adalah perencanaan bottom up dan partisipatif. Perencanaan bottom up artinya perencanaan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal. Maksudnya adalah perencanaan yang dirumuskan oleh fasilitator bersama masyarakat penerima manfaat, praktisi, dan penentu kebijakan yang berkaitan dengan penataan kawasan Sungai Winongo. proses perencanaan dilakukan sejak awal dengan tujuan agar masyarakat terlibat dan berperan aktif dalam proses penyusunan perencanaan tersebut setelah pengidentifikasian kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan ini dianggap terlambat bagi FKWA di wilayah Pakuncen karena tidak seimbangnya antara pembangunan Ngampilan dan Pakuncen.

Dalam proses penyusunan perencanaan ini masyarakat membuat perencanaan atau desain kawasan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Penyusunan perencanaan progam penataan kawasan sungai ada yang dapat dilaksanakan, namun juga yang tidak dilaksanakan. Hal ini karena ada beberapa perencanaan yang apabila dalam penyusunan perencanaan tersebut dianggap belum menjadi satu kawasan. Maksudnya adalah penyusunan perencanaan tersebut masih bersifat parsial artinya perencanaan tersebut masih terputus-putus belum terintegerasi satu sama lain. Dalam hal ini usulan yang ada di Pakuncen terkait penataan kawasan Sungai Winongo sesuai kronologi pembangunan dimulai sejak tahun 2012 hingga 2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama usulan Kegiatan | Lokasi |
| 1 | Pembangunan Hidran | 2 Lokasi ( 1 RT 47 dan RT 45) |
| 2 | Pembangunan Pembangunansepanjang talud | 200 M ( sepanjang taludsungai) |
| 3 | Pemasangan Water Meter |  |
| 4 | Pembangunan Talud Makam | 200 M |
| 5 | Perbaikan IPAL Komunal | 400 M |
| 6 | Pembangunan PAM RW | 2 Lokasi ( RT 46 dan RT 47) |
| 7 | Ruang Terbuka Hijau | Di Bantaran Sungai |
| 8 | Jalan Konblok | 400 M ( seluruh RW 10 ) |
| 9 | Pembangunan jalan akses kesungai | 20 M |
| 10 | Pembangunan Gazebo | 6 buah |
| 11 | Pembangunan Pendopo untukkegiatan warga | 1 buah |
| 12 | Pembangunan Rumah TidakLayak Huni | 3 Rumah ( RT 46) |
| 13 | Pembangunan Rumah BantaranSungai ( M3K) | 3 RT 47 dan 3 RT 46 |

Usulan Perencanaan Kawasan Sungai tahun 2016

*Sumber: Profil pengembangan dan penataan kawasan permukiman Sungai Winongo di RW 10 dan 11 Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan.*

 Dari data yang didapat penulis di lapangan, usulan perencanaan penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh Forum Komunikasi Winongo Asri di Pakuncen Yogyakarta ada beberapa aspek Fisik dan Non Fisik dalam penataan kawasan sungai khususnya Sungai Winongo di Wilayah Pakuncen yang mana aspek-aspek penataan kawasan sungai untuk mengurangi kekumuhan yang ada di wilayah RW 10 Pakuncen untuk meningkat kualitas hidup masyarakat antara lain adalah pertama, aspek kondisi bangunan gedung dengan kriteria ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, dan ketidaksesuaian dengan porsi teknis bangunan. Kedua, aspek kondisi jalan lingkungan dengan kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan dan kualitas permukaan jalan lingkungan. Ketiga, aspek kondisi penyediaan air minum dengan kriteria ketersediaan akses aman air minum dan terpenuhinya kebutuhan air minum. Keempat, aspek kondisi drainase lingkungan yang mempunyai kriteria ketidakmampuan mengalirkan air, ketidaktersediaan Drainase, tidak terhubungnya sistem drainase kota tidak adanya drainase dn kualitas konstruksi drainase. Kelima aspek kondisi pengelolaan air limbah kriterianya adalah sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai teknis, sarana dan prasarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Aspek yang selanjutnya terkait kondisi pengelolaan persampahan mempunyai kriteria sarana prasarana dan sistem persampahan yang tidak sesuai dengan standart yang juga tidak terpeliharanya pengelolaan persampahan. Terakhir, dilihat dari pennanggulangan risiko bencana aspek kondisi proteksi kebakaran diusulkan oleh warga karena rentannya kebakaran yang ada di wilayah RW 10 dengan harapan adanya pembuatan hidran.

* Lobbying: Membawa Usulan Masyarakat Ke Pemerintah

Berdasarkan kesepakatan hasil perencanaan bersama, FKWA melakukan fungsi sebagai broker. FKWA membuat mapping/pemetaan berupa grand desain perencanaan yang disampaikan ke pemerintah sebagai pengelola dana untuk mewujudkan kehendak masyarakat. Lembaga- lembaga tersebut adalah Dinas PU ESDM ( Pekerjaan Umum,Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral), BBWSSO (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak), Dinas PUPKP ( Pekerjaan Umum, Perumah dan Kawasan Permukiman), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Setelah itu, FKWA audiensi kepada lembaga terkait. Hasil audiensi ditanggapi positif oleh pemerintah. Namun pemerintah tidak bisa mengeksusi pada tahun tersebut. Namun menganggarkan pada tahun berikutnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan tahun 2012-2017. Dalam tahapan lobbying ini FKWA berupaya untuk menjadi penghubung ke dinas terkait dalam menyelesaikan persoalan. Gambar 20 menunjukkan bahwa Ibu Endang dan Ibu Ana melakukan koordinasi terkait pembangunan Jembatan di wilayah Pakuncen RW 10. Dalam gambar 21 adanya proses pemaparan koridor permukiman di Sungai Winongo dalam gambar tersebut tidak hanya Ibu Endang saja namun ada beberapa anggota FKWA. Terakhir adalah lobbying penanganan kawasan permukiman.

* Pelaksanaan Penataan Kawasan Sungai Winongo

Tahapan selanjutnya setelah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat mengimplementasikan apa saja yang telah dirumuskan bersama-sama. Tahap ini sangat krusial karena sesuatu yang sudah direncanakan terkadang dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara masyarakat, komunitas dan pemerintah sendiri. Dalam hal ini secara tidak langsung ada pemberdayaan masyarakat yang merupakan serangkaian tindakan komunitas dan masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian informasi terkait akses dan peluang untuk mencapai sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan.

Pelaksanaan progam penataan ini melibatkan masyarakat secara partisipatif dan aktif pada setiap prosesnya. Dengan pelibatan ini masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab dengan apa yang mereka bangun. pembangunan awal pada tahun 2012 pembukaan akses jalan di Pakuncen. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan ini berjalan pada tahun 2013 yang saait itu ada progam pembangunan talud pengaman sungai dan awal mulanya bank sampah “Migunani”. Tahun 2014 di Pakuncen ini ada kegiatan festival Sungai Winongo dan pembangunan talud permukiman. Pada tahun 2015 awal pembangunan talud permukiman tahap kedua., pada tahun ini juga di pertengahan tahun pembangunan talud dan jembatan untuk dijadikan akses ke wilayah seberang. Kemudian tahun 2016 adanya pembangunan selokan air hujan dan pengaspalan jalan. Selokan air hujan ini agar saat musim hujan mengurangi genangan air yang ada di jalan. FKWA bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan GIZ (German Organisation for International Cooperation ) dalam kegiatan peningkatan kapasitas building mapping (eko mapping), kegiatan ini mengajak masyarakat berdiskusi dan berfikir tentang permasalahan dan solusi untuk penataan kawasan di tahun 2015 dan tahun 2016. Yang terakhir pada tahun 2017 pengadaan IPAL Komunal untuk limbah masyarakat. Setelah tahun 2014 kegiatannya dibangun pemenang tender. Meskipun demikian masyarakat juga dipekerjakan sebagai buruh oleh pemenang tender. Progam yang terlaksana adalah sebagai berikut: pembangunan pengaman sepanjang talud, pembangunan talud makam, pembangunan jalan akses ke sungai, ruang terbuka hijau dibantaran sungai, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan rumah bantaran sungai (M3K).

Penataan kawasan Sungai Winongo yang sudah dilaksanakan ada yang berasal dari perencanaan masyarakat dan pada kenyataannya tidak semua usulan masyarakat diterima oleh SKPD terkait. Pembangunan ini dilakukan secara bertahap. Waktu yang digunakan untuk proses pembangunan ini ada yang 3 bulan ada pula yang 6 bulan tergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Namun, dalam pelaksanaan pembangunan ini keberlanjutan dari tahun sebelumnya. pelaksanaan pembangunan di Pakuncen itu setiap tahunnya ada anggaran dari pemerintah. Terkadang dalam pembangunan ini ada tumpang tindih alokasi pekerjaan yang dikerjakan oleh berbagai instansi. Pakuncen mendapat tiga sumber dana untuk penataan kawasan. Pakuncen bisa seperti ini karena masuk dalam SK Walikota No 216 tahun 2016 penetapan lokasi kawasan kumuh di Kota Yogyakarta yang didalamnya ada Kecamatan Wirobajan, Kelurahan Pakuncen lokasi RW 8, 10, dan 11 dengan Luas 10,17 Ha.

* Monitoring / Pemantauan

Proses selanjutnya dalam penataan kawasan sungai yakni adalah monitoring (pemantauan). Monitoring adalah proses berkala pengumpulan data dari proses assessment hingga proses evaluasi dan pengukuran kemajuan progres progam. Secara garis besar monintoring adalah memantau jalannya progam yang fokus proses dan output progam tersebut. Biasanya monitoring dan evaluasi berjalan bersama, akan tetapi pada dasarnya proses monitoring itu tidak hanya bersamaan dengan proses evaluasi namun proses pemantauan ini ada pada tiap tahapan proses.

Pemantauan/monitoring dalam penataan kawasan sungai ini secara formal dilakukan oleh pemerintah. Meskipun demikian masyarakat dan FKWA juga memantau pelaksanaan kegiatan. Salah satunya jika ada persoalan mereka memotret dan disampaikan melalui media sosial ke FKWA. Laporan itu kemudian dilanjutkan FKWA ke pemerintah. Hal ini terjadi karena menurut masyarakat pemerintah kurang intens dalam memonitoring pembangunan.

Monitoring / pemantauan yang dilakukan oleh FKWA maupun SKPD yang terkait sudah berjalan dan dilakukan dengan semestinya, bagi FKWA proses pemantauam dari penataan kawasan sungai merupakan tanggungjawab bersama dan dapat dilakukan tidak harus oleh lembaga tapi bisa pula dipantau oleh pengurus / tokoh masyarakat yang ada di wilayah. proses monitoring penataan kawasan sungai tidak secara langsung dilakukan oleh FKWA walaupun demikian monitoring sudah dipasrahkan ke tokoh masyarakat ataupun perwakilan per titik oleh perwakilan FKWA. Hal ini dengan harapan bahwa pemantauan ini tidak hanya terjadi bersamaan dengan evaluasi. Jadi, pada tahap ini sudah dilakukan sejak awal pengidentifikasian kebutuhan / proses assessment.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat penulis menyimpulkan tahap pemantauan/ monitoring progam penataan kawasan sungai menjadi baromater masyarakat untuk pelaksanaan progam. Adanya tahap monitoring di setiap proses penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat di Pakuncen ini baik FKWA maupun instansi yang terkait dan masyarakat yang terlibat mempunyai peran penting sebagai penggerak masyarakat.

* Evaluasi

Proses yang terakhir yakni evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah yang mengundang tokoh-tokoh masyarakat Pakuncen dan pengurus FKWA. Namun sebelum evalusi formal, tokoh-tokoh masyarakat juga sudah melakukan evaluasi lokal yang mengundang masyarakat secara umum. Evaluasi lokal itu kemudian disampaikan ke pemerintah. Evaluasi ini berperan menjadi penting dalam hal memperbaiki progam yang telah berjalan pada tahun sebelumnya. Adanya evaluasi juga sebagai barometer pelaksanaan penataan kawasan sungai di Pakuncen dapat memberikan penilaian terhadap kegiatan yang terlaksana. dapat diartikan bahwa proses Evaluasi dilakukan secara musyawarah bersama dengan masyarakat. Harapannya jika ada hal yang perlu diperbaiki masyarakat tahu apa saja yang harus dan tidak harus dilakukan.

 Evaluasi ini berperan penting ketika pada saat proses pelaksanaan penataan kawasan sungai tidak sesuai dengan proses perencanaan. tahap evaluasi menjadi rangkaian yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan penataan kawasan sungai, kendala-kendala dan hambatan dalam penataan kawasan sungai bisa menjadi catatan di proses penataan kawasan Sungai Winongo. Dapat dipahami dari data yang diperoleh dilapangan bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat bantaran Sungai Winongo tepatnya RW 10 adalah dengan melihat capaian yang telah dilakukan FKWA, masyarakat, dan stakeholder yang terkait dan memantau sejauh mana perkembangan atau dampak penataan kawasan Sungai Winongo di masyarakat. Sedangkan dari FKWA dalam proses evaluasi ini lebih kepada keterlibatan masyarakat dalam proses penataan kawasan Sungai Winongo. Maksudnya adalah proses evaluasi menjadi tanggungjawab bersama dengan masyarakat. Peran FKWA dalam proses penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat di Pakuncen Yogyakarta adalah sebagai mediator dan mengawal jalannya proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan penataan kawasan Sungai Winongo. Hal yang berkaitan dengan teknis diserahkan kepada masyarakat bantaran sungai agar masyarakat merasa memiliki bahwa penataan kawasan sungai adalah kebutuhan warga bukan kebutuhan pemerintah ataupun yang lainnya. penulis dapat menyimpulkan bahwa proses evaluasi sudah dilakukan proses evaluasi berbasis masyarakat meskipun dilakukan perwakilan. Dalam evaluasi itu keluhan masyarakat langsung didengarkan oleh pemerintah. Persoalan yang muncul adalah adanya salah paham dalam pelaksanaan proyek dan persoalan status tanah / sertifikat yang sampai saat ini belum terpecahkan. Dalam proses tersebut pemerintah berjanji akan lebih baik.

**Dampak Penataan Kawsan Sungai Winongo**

Dampak merupakan akibat adanya suatu tahapan kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya penataan kawasan Sungai Winongo tentunya ada hal berbeda yang dapat dirasakan oleh Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) serta masyarakat yang berdampak di sekitarnya, yaitu dampak perubahan kondisi fisik/lingkungan, dampak perubahan perilaku, dan dampak ekonomi.

Dampak perubahan kondisi fisik/lingkungan yang sudah ada di RW 10 Pakuncen adalah adanya jalan inspeksi, pembangunan talud permukiman, pembangunan talud makam, adanya saluran air hujan, saluran pengairan drainase. Pembangunan-pembangunan ini membuat kondisi Pakuncen terlihat semakin rapi bahkan kandang sapi yang dulunya kumuh sudah ditata dengan baik sehingga kotornnya tidak mencemari sungai dan lingkungan. Bahkan saat ini kandang sapi yang dulunya kumuh disini disebut “Asrama Sapi” karena bersih. Pembangunan talud juga menyebabkan kawasan ini semakin kuat dalam menahan banjir dan tanah longsor. Pakuncen dulu dikenal daerah kumuh saat ini, Pakuncen sudah terlihat bersih. Setelah adanya penataan persoalan terkait sampah, banjir sudah diatasi. Penataan ini berbasis masyarakat. Masyarakat berperan aktif dalam prosesnya. Penataan kawasan di Pakuncen ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kondisi wilayah seperti, akses jalan permukiman di RW 10 Pakuncen yang menuju ke Sungai Winongo, talud permukiman di RW 10 Pakuncen. Kondisi Sungai Winongo yang ada di Pakuncen sebelum penataan kawasan adanya tumpukkan sampah dan pencemaran limbah. Hal ini berakibat jika musim hujan dipastikan banjir dan tanah longsor. Namun, terjadi perubahan kondisi Sungai Winongo setelah penataan kawasan. Sudah berkurangnya tumpukan sampah dan adanya talud pengaman untuk menahan tanah agar tidak longsor.

 Hasil Penataan dan Dampak Penataan Kawasan Sungai di RW 10 Pakuncen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Hasil Penataan | Dampak |
| 1. | Pembukaan Jalan keSungai Winongo | Sebagai akses masyarakat untukberaktifitas sehari-hari. |
| 2. | Talud pengamansungai | Untuk menahan banjir dan longsor |
| 3. | Talud permukiman | Untuk melindungi permukiman yang di atasnya jika musim hujan talud ini dapat menahan permukiman yang ada dibantaran sungai |
| 4. | Jembatan | Untuk menyeberang warga agar mudah untuk aktifitas sehari-hari. Apalagi banyakpedagang di Pasar Serangan dan Klitikan. |
| 5. | IPAL Komunal | Untuk mengatur limbah rumah tanggamasyarakat |
| 6. | Selokan air hujan | Sebagai resapan air ketika musim hujan |

*Sumber : olah data penulis dari hasil wawancara dan observasi*

Bukan hanya berdampak pada infrastruktur saja, namun penataan kawasan Sungai Winongo ini juga berdampak pada perubahan non fisik seperti perubahan perilaku masyarakat, perubahan ekonomi serta dampak negatif yang muncul setelah penataan kawasan Sungai Winongo. dampak penataan kawasan Sungai Winongo terkait dampak sosial dan perilaku yang terjadi masyarakat adalah membentuk tumbuhnya kesadaran masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku/sikap/tindakan masyarakat. seperti hal nya perilaku membuang sampah di sungai, BAB di sungai, dan belum menganggap bahwa sungai adalah halaman depan rumah yang harusnya bersih. Dengan adanya penataan kawasan Sungai Winongo ini terjadilah perubahan tersebut kepada masyarakat dan pola hunian masyarakat. Dampak sosial yang terjadi setelah penataan kawasan Sungai Winongo ini adalah perubahan perilaku masyarakat, dalam hal ini perubahan perilaku masyarakat yang dimaksud adalah perubahan perilaku masyarakat yang semula masih menganggap sungai adalah tempat sampah. Adanya perubahan perilaku yang semula buang sampah ke sungai saat ini sudah mulai berkurang dengan adanya solusi Bank Sampah yang saat ini di kota ada 54 Bank Sampah yang di sepanjang Sungai Winongo. Adanya perubahan kondisi yang semula pinggir sungai adalah tempat sampah saat ini sudah di rubah menjadi satu kawasan hijau dan jadi ruang public. Sudah adanya pengurangan karamba yang ada di tengah sungai karena menghambat arus air sungai.

Dampak sosial yang kedua adalah adanya tingkatan adaptasi pada tindakan masyarakat terhadap penataan kawasan Sungai Winongo di Pakuncen ini. Selain tingkatan adaptasi adanya aspirasi masyarakat yang dapat memberikan warna terhadap penataan kawasan sungai. Aspirasi masyarakat merupakan usulan, ide, keinginan, kehendak yang disertai harapan agar bisa tercapai dan diwujudkan. Dalam penataan kawasan Sungai Winongo, aspirasi masyarakat di tampung sejak tahap assessment, dan perencanaan yang mana masyarakat berperan aktif di dalamnya dalam merumuskan suatu progam/cita-cita luhur dalam hal proses pembangunan. Aspirasi yang di gunakan masyarakat berbagai macam bentuknya ada yang tertulis,dan lisan. Dalam proses perencanaan misalnya masyarakat lebih menggunakan aspirasi lisan karena peran masyarakat menjadi hal utama dalam proses perencanaan. Hal ini menjadi dampak sosial dan perilaku sendiri terhadap masyarakat bantaran sungai yang dilibatkan dalam penyampaian aspirasi. Selain itu adanya Keterbukaan wakil rakyat yang secara informal mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu modal dalam mengawal penataan kawasan sungai. Keterbukaan komunikasi antara wakil rakyat dan masyrakat perlu dikembangkan secara intensif.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Emmanuel Adi Prasetya[[13]](#footnote-13):

“ Komisi C DPRD Kota siap mendengarkan aspirasi masyarakat di sekitar sungai. Usulan dan pendapat bisa dikomunikasikan secara informal tanpa harus ke Kantor DPRD. Komisi C DPRD Kota siap mengawal dan mengkomunikasikan usulan dan permasalahan masyarakat kepada dinas terkait di Kota Yogyakarta”

Meningkatnya adaptasi dan aspirasi masyarakat juga berpengaruh terhadap partisipasi dan kebiasaan penduduk pada sikap/tindakan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah keterlibatan masyarakat baiksecara individu maupun kelompokdalam proses pengidentifikasian masalah, pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, maupun monitoring kegiatan baik secara sukarela maupun memiliki kepentingan demi kehidupan dan lingkungan mereka.Keterlibatan masyarakat dalam tahapan-tahapan penataan kawasan Sungai Winongo berbasis mayarakat oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta. Tujuannya adalah menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat yang berkepntingan dalam penataan kawasan sungai dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena dengan melibatkan masyarakat dapat melihat kebutuhan masyarakat.

Meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi terbuka dalam penataan permukiman kumuh di sepadan sungai. Masyarakat yang di sekitar bantaran sungai mempunyai kesempatan untuk mengusulkan penataan kawasan sungai yang masuk dalam kawasan kumuh.

Hal ini senada dengan pernyataan bapak Agus Tri Haryono[[14]](#footnote-14):

“Dinas PUPKP Kota Yogyakarta dapat menerima usulan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur permukiman. Pemerintah Kota siap mengawal progam pengentasan kawasan kumuh di bantaran sungai dengan bekerjasama dengan komunitas. Kendala yang dihadapi adalah perencanaan pengentasan kawasan kumuh masih parsial”

 Adanya penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen ini berdampak pada partisipasi masyarakat yang meningkat lebih baik dari sebelumnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap kebiasaan penduduk yang semula menganggap bahwa sungai adalah tempat sampah, tempat BAB, dan tempat kumuh lainnya. Di kota Yogyakarta bantaran sungai yang awalnya adalah tempat sampah dan kandang ternak sekarang sudah ada 8 lokasi yang di benahi dan menjadi Ruang Terbuka Hijau di bantaran sungai, salah satunya di Pakuncen yang mempunyai Ruang Terbuka Hijau namun masih Pasif di gunakan. Gerakan peduli sungai yang di mulai FKWA dari kota Yogyakarta tahun 2009 , telah berhasil mengajak masyarakat bantaran sungai yang ada di hulu sungai winongo dan hilir sungai winongo dengan terbentuknya FKWA Sleman dan FKWA Bantul. Kegiatan – kegiatan FKWA juga sudah di tiru oleh komunitas komunitas yang lainnya dengan tumbuhnya komunitas komunitas sungai yang saat ini ada banyak di kota Yogyakarta maupun di wilayah lainnya. Adanya penghargaan yang diterima oleh FKWA sebagai salah satu komunitas sungai yang melakukan upaya penataan kawasan sungai terbaik oleh PU pada tahun 2013.

Dampak selanjutnya perilaku akibat dari penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta adalah meningkatnya gotong royong. Kunci keberhasilan penataan kawasan sungai dalam tahapannya memerlukan sikap gotong royong dari masyarakat. Sikap Gotong royong sebenarnya sudah ada di masyarakat, tetapi dengan adanya penataan kawasan sungai ini gotong royong masyarakat meningkat karena masyarakat di tuntut untuk aktif ikut gotong royong sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Dengan sikap gotong royong tinggi diharapkan akan menjadikan masyrakat lebih erat hubungan satu sama lain sehingga dapat menyadarkan masyarakat dalam merubah pola perilaku dalam menata kawasan sungai agar lebih berdaya. Bentuk gotong royong warga adalah sikap bantu membantu satu sama lain dalam bentuk tenaga, pikiran, dan bentuk kebersamaan masyarakat untuk kepentingan masyarakat.

Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Edi selaku ketua RT 47[[15]](#footnote-15):

“Anu mbak penataan kawasan ini membuat masyarakat lebih bersama gotong royongnya, tambah semangat ikut pelaksanaannya. Gotong royong ini berbentuk macam-macam mbak kadang waktu angkut material ya kadang waktu pembangunan.

Selain itu dampak sosial dan perilaku terkait meningkatnya gotong royong dalam penataan kawasan sungai di Pakuncen juga mulai mempengaruhi dan menyadarkan masyarakat sebagai bentuk kebersamaan.

Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Suryati selaku warga Pakuncen[[16]](#footnote-16):

“meningkat mbak gotong royongnya. Saling membantu satu sama lain. Lha sedikit-sedikit itu masyarakat agak sadar pentingnya kebersamaan. Tahu sendiri masyrakat kota itu karakternya bagaimana. Adanya pembangunan kawasan sungai ini membuat warga tambah kebersamaan, tambah gotong royongnya dan juga mbak tambah tahu kebersamaan. Jadi itu yang buang sampah sampah di sungai ya agak merasa sungkan lah ya mbak. Orang sudah dikerjakan bareng kayak gini oleh warga masak ya mau ada sampahnya dibuang di sungai lha kita itu gotong royongnya gak waktu pembangunan aja mbak kita gotong royongnya waktu angkut-angkut bahan, terus waktu mertikali, apalagi pas musim hujan”.

Perubahan dari proses penataan kawasan Sungai Winongo ada yang berupa fisik pembangunan, sosial perilaku dan ada pula yang di bidang ekonomi. Penataan kawasan sungai Winongo di Pakuncen ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang hakikatnya menjadikan seseorang yang lemah dapat memenuhi kebutuhannya. Secara ekonomi, dengan adanya penataan kawasan Sungai Winongo di Pakuncen ini dapat mendapat pendapatan bagi masyarakat sekitaran bantaran sungai walaupun tidak secara langsung di rasakan masyarakat. Oleh karenanya dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Pakuncen RW 10.

Dampak ekonomi yang dimaksudkan adalah mulai adanya tindakan ekonomi atau bisa dikatakan baru muncul kegiatan ekonomi yang dilakukan di bantaran Sungai Winongo oleh warga dimulai dari berjualan di pinggiran sungai. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan warga itu sendiri. Setidaknya ada akibat dari penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat di Pakuncen ini yang berdampak pada keekonomian masyarakat. Adapun dampak ekonomi yang telah dirasakan masyrakat karena adanya penataan kawasan sungai sebagai berikut , Peningkatan pendapatan ekonomi menjadi tolak ukur dalam melihat dampak dari suatu penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat di Pakuncen. dalam hal ini penataan kawasan sungai memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian beberapa warga yang ada di bantaran sungai. Karena penataan kawasan sungai inilah dapat dijadikan tempat berjualan, salah satunya Angkringan. Walaupun tidak dirasakan langsung namun setidaknya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. dampak ekonomi penataan kawasan sungai adalah dengan ditandai mulai adanya peningkatan ekonomi warga walaupun tidak dirasakan langsung oleh mereka.

Selain adanya peningkatan pendapatan dampak yang terjadi akibat penataan kawasan Sungai Winongo adalah adanya tindakan ekonomi yang berpengaruh terhadap kesejathteraan. Hal ini dimaksudkan bahwa penataan kawasan sungai ini berdampak kepada masyarakat bantaran sungai dan melakukan kegiatan/tindakan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan hidup warga. Di RW 10 Pakuncen ini tindakan ekonominya dimulai adanya angkringan pinggir sungai. Benar adanya bahwa tindakan ekonomi ini masih dalam proses tidak dapat dirasakan warga.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ana[[17]](#footnote-17) :

“ Tindakan ekonomi sudah ada mbak, dan gimana ya menurut saya belum ya kalau membentuk jaringan. Soale baru dimulai jadi ya baru beberapa warga yang sudah mulai merasakan dampaknya penataan kawasan sungai. Dan kalau dibilang kelompok peduli sungai kita ada namun kegiatan nya memang masih belum aktif baru sekedar kader lingkungan gitu mbak, dan juga sini kalau kegiatan ekonomi ya masih sebatas itu “

Dapat penulis simpulkan bahwa dampak ekonomi penataan kawasan sungai winongo di Pakuncen adanya peningkatan pendampatan dan sudah mulai adanya tindakan ekonomi masyarakat yang terdampak karena penataan kawasan tersebut. Hal ini sesuai dengan tori Bintarto yang menyatakan bahwa dampak ekonomi yang terjadi setelah proses pembangunan berwawasan lingkungan dengan adanya tindakan ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan dan peningkatan pendapatan.

Adanya penataan kawasan Sungai Winongo yang ada di RW 10 ini penulis juga menemukan dampak negatif dengan adanya akses jalan yang mudah banyak remaja luar bukan remaja RW 10 Pakuncen yang sering menjadikan pinggiran Sungai Winongo tempat berkumpul dan berkegiatan di pinggir sungai. Kegiatan remaja tersebut yakni berpacaran, nongkrong hingga larut bahkan adapula yang minum-minuman keras. Hal ini membuat resah masyarakat hingga masyarakat membuat portal untuk menutup akses mereka. Selain itu, di pinggiran Sungai Winongo masih kurang penerangan sehingga banyak anak-anak yang bersembunyi untuk penyimpangan sosial. penataan kawasan di Pakuncen ini juga berdampak negatif karena daerah pinggiran sungai di jadikan basecamp remaja berkumpul dan berkegiatan yang menyebabkan penyimpangan sosial.

Seperti yang diungkapkan Bapak Edi[[18]](#footnote-18):

“iya di pinggir sungai itu dibuat kumpul remaja lho buk, terus ya di pinggir sungai banyak anak SD yang pacaran. Karena itu RT 47 sepakat membuat portal. Ternyata portalnya justru di lem sama anak-anak tersebut. Lha maunya apa? Yang ronda ya juga sudah jaga ya ada. Malahan kalau waktu mabuk gitu. Sini ya nggak mau kalau wilayah kami di injak-injak abak kayak gitu”.

Senada dengan Bapak Iwan[[19]](#footnote-19):

“ setau saya pinggir kali sekarang malah dibuat mejeng(bergaya) sama anak-anak luar kampung. Saya ndak tahu apa ada anak dalam yang mengajak atau bagaimana yang jelas sempat ada yang terciduk kapan itu pas lagi minum atau apa. Nah yang disayangkan ada anak kampung sini RW sebelah atau bahkan anak RW 10 sendiri. Makanya dianggap yang mengajak anak tersebut. Lha gimana anak SD sekarang sudah pacaran tiap malam sabtu ya dampak sekolah fullday. Abis itu anak-anak SMP itu juga ngumpul- ngumpul sampai malem ketawa keras njuk(terus) motor di bleyer-bleyer(memainkan gas motor) kan sangat menganggu warga itu.”

**Penutup**

Proses penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta melalui 6 tahap. Tahap tersebut dimulai dari tahap *assasment*, tahap perencanaan, tahap lobbying, tahap pelaksanaan/ implementasi, tahap monitoring dan tahap evaluasi. Proses penataan tersebut melibatkan masyarakat. FKWA menjadi lembaga kunci yang mampu menjembatani kebutuhan dan persoalan masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Tanpa FKWA masyarakat tidak mengetahui kemana persoalan itu harus dilaporkan. Sedangkan dampak penataan kawasan sungai di Pakuncen lebih banyak dampak positif dibanding negatifnya. Dampak tersebut antara lain perubahan kondisi fisik/lingkungan, tumbuhnya kesadaran masyarakat, meningkatnya partisipasi masyarakat, meningkatnya gotong royong, dan adanya dampak ekonomi. Sedangkan dampak negatifnya adalah dijadikannya area pinggir sungai tempat perkumpulan remaja untuk penyimpangan kenakalan remaja. Penataan kawasan Sungai Winongo berbasis masyarakat oleh FKWA di Pakuncen Yogyakarta telah mampu mengurangi permasalahan permukiman kumuh dan mengurangi permasalahan sosial namun belum bisa maksimal di masing-masing wilayah.

Berdasarkan proses diatas akan lebih baik apabila adanya Optimalisasi pemanfaatan lingkungan fisik. Selama ini sudah dibangun ruang terbuka hijau. Namun di ruang terbuka hijau tersebut fasilitasnya belum lengkap. Penulis menyarankan untuk dibangun gazebo di ruang terbuka hijau sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi. Dengan membentuk kelompok peduli sungai. Kelompok ini diharapkan dapat memaksimalkan perawatan dan pemanfaatan fasilitas yang ada di RW 10 Pakuncen dari tangan-tangan jahil. Serta pengadaan lampunisasi di sekitar kawasan Sungai Winongo RW 10 Pakuncen. Penerangan kawasan ini diharapkan dapat meminimalisir perkumpulan remaja yang sering memanfaatkan fasilitas pinggir sungai sebagai tempat berpacaran dan perilaku menyimpang lainnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aziz Muslim, 2012 Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, Yogyakarta : Samudra Biru

Bintarto. 1992-1994. Pembangunan Berkelanjutan dalam Aspek Ekologis, “Majalah Geografi Indonesia”, Th. 6-8, No. 10-13.

Dwijo Putro, Jawas. 2011. Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya, Jurnal Teknik Sipil Untan, Volume 11 Nomor 1

Joko Ari, Cahyono, Paparan kebijakan penanganan kawasan kumuh dalam diskusi kawasan kumuh di Universitas Kristen Duta Wacana pada 01 Maret 2018

Karim, Tony . 2010. Pengaruh Penataan Bantaran Sungai Bau-Bau Terhadap Pola Hunian Masyarakat di Kelurahan Tomba dan Bataraguru kota Bau-Bau. Universitas Diponegoro Semarang

Laporan Antara Rencana Pengembangan Kawasan Sungai Winongo, Bappeda, 2010 Jogjakota.go.id, diakses 06 Januari 2018 pukul 02.35 WIB

Maryati, 2017. anies baswedan pelajari penataan kawasan Sungai Winongo koran antara news. Antaranews.com. diakses pada 16 Desember 2017 pukul 00:24 WIB

Mikkelsen, Britha.2003. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan. Terjemahan Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rukminto Adi, Isbandi.2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sekar Ika,Indrawati Keragaman Pemanfaatan Sungai oleh Masyarakat Bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan dan Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2010 (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012),

Widodo B,. 2010. Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat: Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan; Vol 2 No 1 ; Januari

**Wawancara**

Emmanuel Adi Prasetya ( 2017 )

Agus Tri Haryono ( 2017 )

Edi ( 2018)

Suryati ( 2018)

Ana ( 2018)

Iwan ( 2018)

1. Laporan Antara Rencana Pengembangan Kawasan Sungai Winongo, Bappeda, 2010 Jogjakota.go.id, diakses 06 Januari 2018 pukul 02.35 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. Jawas Dwijo Putro, Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya, Jurnal Teknik Sipil Untan, Volume 11 Nomor 1 –Juni 2011, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-2)
3. Maryati, Anies Baswedan pelajari penataan kawasan Sungai Winongo koran antara news, Antaranews.com, diakses pada 16 Desember 2017 pukul 00:24 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Joko ari cahyono, Paparan kebijakan penanganan kawasan kumuh dalam diskusi kawasan kumuh di Universitas Kristen Duta Wacana pada 01 Maret 2018 [↑](#footnote-ref-4)
5. Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 247-252 [↑](#footnote-ref-5)
6. Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan, Terjemahan Matheos Nalle, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal 64. [↑](#footnote-ref-6)
7. Bintarto, Pembangunan Berkelanjutan dalam Aspek Ekologis, *“Majalah Geografi Indonesia”*, Th. 6-8, No. 10-13, September 1992 – Maret 1994, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sekar Ika,Indrawati Keragaman Pemanfaatan Sungai oleh Masyarakat Bantaran Sungai Winongo di Kecamatan Ngampilan dan Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2010 (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. Tony Karim, Pengaruh Penataan Bantaran Sungai Bau-Bau Terhadap Pola Hunian Masyarakat di Kelurahan Tomba dan Bataraguru kota Bau-Bau (Universitas Diponegoro Semarang, 2010), hlm. 1 [↑](#footnote-ref-9)
10. Widodo B, Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat: Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan; Vol 2 No 1 ; Januari 2010, hlm. 7 [↑](#footnote-ref-10)
11. Aziz Muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, ( Yogyakarta : Samudra Biru, 2012) hlm. 35. [↑](#footnote-ref-11)
12. Aziz muslim, Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, ( Yogyakarta : Samudra Biru, 2012) Hlm. 36. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hasil wawancara dengan Bapak Emmanuel Adi Prasetya selaku Komisi C DPRD Kota Yogyakarta pada 12 oktober 2017 [↑](#footnote-ref-13)
14. Hasil wawancara dengan bapak Ir. Agus Tri Haryono selaku Kepala Dinas PUP KP pada 5 November 2017 [↑](#footnote-ref-14)
15. Hasil wawancara dengan Bapak Edi ketua RT 47 pada 16 Januari 2018 pukul 21.23 WIB [↑](#footnote-ref-15)
16. Hasil wawancara dengan Ibu Suryati warga Pakuncen pada 13 Maret 2018 pukul 12.10 WIB [↑](#footnote-ref-16)
17. Wawancara dengan Ibu Ana ketua RW 10 Pakuncen pada 27 Februari 2018 pukul 18.39 WIB. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hasil pernyataan Bapak Edi selaku mantan ketua RT 47 pada 25 April 2018 pukul 20.01 dalam pertemuan RW 10 di Rumah Ketua RW 10 Pakuncen. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku Ketua RT 47 Baru pada 25 April 2018 pukul

20.30 WIB [↑](#footnote-ref-19)